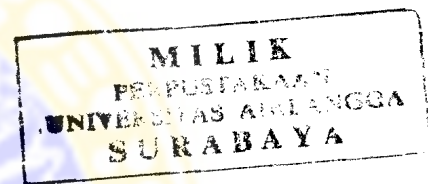


**SKRIPSI**

**FAHRUDI ANDRIANTO**

**TANGGUNG GUGAT PEMBORONG DALAM  
PERJANJIAN PEMBANGUNAN RUMAH PRIBADI**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **TANGGUNG GUGAT PEMBORONG DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN RUMAH PRIBADI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**Dosen Pembimbing,**



**Sri Handajani, S.H., M.S.**

**NIP : 130 809 069**

**Penyusun,**



**Fahrudi Andrianto**

**039614347**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Kendala-kendala yuridis dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan untuk pembangunan rumah pribadi dapat berupa *overmacht* (*force majeure*) dan wanprestasi. Bila tidak terlaksananya pembangunan rumah pribadi karena *overmacht* maka para pihak tidak bisa melakukan tuntutan pada pihak yang lain. Sedangkan pada tidak terlaksananya pelaksanaan pembangunan rumah pribadi karena wanprestasi maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
- b. Bila wanprestasi dilakukan oleh pemborong maka pemesan dapat menempuh penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu. Bila penyelesaian sengketa dengan melalui jalur diluar pengadilan mengalami jalan buntu maka dapat ditempuh jalur pengadilan.  
  
Gugatan dapat diajukan diajukan kepihak pemborong yang berupa badan hukum (*rechts person*) atau orang (*naturlijk person*). Bila pihak pemborong merupakan badan usaha yang bukan badan hukum maka gugatan diajukan pengurus dari badan usaha tersebut.

## **2. Saran.**

- a. Perjanjian pemborongan hendaknya dilakukan secara tertulis untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak. Pihak pemesan hendaknya turut aktif dalam pembuatan kontrak perjanjian pemborongan rumah pribadi karena kontrak tersebut akan menentukan hak dan kewajibannya.
- b. Pihak pemesan hendaknya memperhatikan status pemborong dalam perjanjian pemborongan rumah tersebut karena akan menentukan pada siapa ia dapat menuntut apabila pemborong melakukan wanprestasi. Upaya hukum terdahulu yang dapat dilakukan oleh pemesan bila pemborong melakukan wanprestasi adalah negosiasi.